

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj-IP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROV. JAWA TENGAH
TAHUN 2015**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAWA TENGAH
MARET 2016**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov Jateng telah selesai. LKj-IP BPBD merupakan bentuk komitmen BPBD Prov Jateng dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

LKj-IP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja BPBD Prov Jawa Tengah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk laporan dan bertujuan untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui LKj-IP dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian Laporan ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang, Maret 2016

KALAKHAR BPBD PROV JAWA TENGAH

SARWA PRAMANA, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19610211 198403 1 003

DAFTAR ISI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Gambaran Umum Organisasi	6
1. Tugas Pokok dan Fungsi	6
2. Sumberdaya.....	11
B. Fungsi Strategis BPBD Prov Jawa Tengah	22
1. Visi	22
2. Misi	22
3. Tujuan.....	22
4. Sasaran	23
C. Permasalahan Utama yang Dihadapi	23
BAB II PERJANJIAN KINERJA	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014	33
A. Capaian Kinerja Organisasi	33
1. Sasaran Strategis 1	34
2. Sasaran strategis 2.....	39
3. Sasaran Strategis 3	41
4. Sasaran strategis 4.....	43
5. Sasaran Strategis 5	45
6. Sasaran strategis 6.....	46
7. Sasaran strategis 7.....	47

8. Sasaran strategis 8.....	49
9. Sasaran strategis 9.....	51
B. Realisasi Anggaran	54
BAB IV P E N U T U P	57
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Keberhasilan	57
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indeks Rawan Bencana Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	8
Tabel 2 Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jateng	10
Tabel 3 Daerah Rawan Bencana di Jawa Tengah	11
Tabel 4 Jumlah Pegawai BPBD Provinsi Jawa Tengah	12
Tabel 5 Pangkat/Golongan PNS di BPBD Prov. Jawa Tengah.....	12
Tabel 6 Sarana dan Prasarana Kedinasan Umum Tahun 2015	14
Tabel 7 Sarana dan Prasarana Untuk Kondisi Tertentu Tahun 2015	15
Tabel 8 Penetapan Kinerja TA 2015	31
Tabel 9 Skala Pengukuran Kinerja	34
Tabel 10 Perhitungan Kinerja Sasaran 1.....	34
Tabel 11 Pembentukan BPBD Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.....	36
Tabel 12 Perhitungan Kinerja Sasaran 2.....	40
Tabel 13 Perhitungan Kinerja Sasaran 3.....	42
Tabel 14 Perhitungan Kinerja Sasaran 4.....	43
Tabel 15 Perhitungan Kinerja Sasaran 5.....	45
Tabel 16 Perhitungan Kinerja Sasaran 6.....	47
Tabel 17 Perhitungan Kinerja Sasaran 7.....	49
Tabel 18 Perhitungan Kinerja Sasaran 8.....	50
Tabel 19 Perhitungan Kinerja Sasaran 9.....	52
Tabel 20 Kejadian dan Kerugian Bencana Jateng 2015.....	52
Tabel 21 Realisasi dan Efisiensi Anggaran	55
Tabel 22 Pengukuran Pencapaian Sasaran.....	57

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana memberikan amanat pelunya dibentuk lembaga yang menangani bencana, baik di tingkat pusat maupun di daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Pembentukan lembaga penanggulangan bencana di tingkat pusat adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan di provinsi dan kabupaten/kota lembaga tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pembentukan lembaga yang menangani bencana secara permanen merupakan perwujudan dari tanggungjawab bersama dalam penanggulangan bencana. Undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama antara pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) masyarakat dan Lembaga usaha.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti amanat No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dengan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur No 101 tahun 2008 tentang tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2009, untuk mendukung dan menjalankan amanat Perda No 10 tahun 2008 maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Daerah No 11 tahun 2009 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, sebagai dasar

dalam pelaksanaan penyelenggaraan di Jawa Tengah. Mendasarkan peraturan tersebut, BPBD Prov Jateng mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana.

Tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Jawa Tengah telah dijabarkan pada pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Gubernur No. 101 tahun 2008. Tugas pokok BPBD Provinsi Jawa Tengah (pasal 2) yaitu melaksanakan penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah, sedangkan fungsi BPBD Provinsi Jawa Tengah Pasal 3 adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bencana.
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penanggulangan bencana.
5. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Karakteristik wilayah yang cukup kompleks Provinsi Jawa Tengah, baik dari aspek geografis, geologis, hidrologis maupun meteorologis berdampak pada terdapatnya potensi dan sumber kekayaan alam yang melimpah. Namun disisi yang lain, kondisi tersebut juga berpotensi untuk menimbulkan bencana baik bencana alam maupun non alam, maupun bencana social, seperti Ancaman bencana gempabumi, letusan gunung api, tsunami, kebakaran, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan. Ancaman bencana di Jawa Tengah

tersebar secara merata di seluruh wilayah. Kewaspadaan dan kesiapsiagaan para pemangku kepentingan harus terus ditingkatkan.

Kajian tingkat kerawanan dan risiko bencana di Jawa Tengah telah dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tahun 2011 BNPB melakukan kajian terhadap tingkat rawan bencana dan pada tahun 2013 BNPB melakukan kajian untuk tingkat risiko bencana di seluruh Indonesia. Indeks rawan bencana (2011) dihitung dari data korban/kerusakan yang tercatat (*existing data*) untuk setiap bencana, sedangkan indeks risiko bencana (2013) dihitung dari potensi kemungkinan korban dan dampak yang akan ditimbulkan. Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Perhitungann indeks risiko bencana ditekankan pada potensi kemungkinan dan besarnya dampak yang diukur dari keterpaparan (*exposure*) dari setiap bahaya (*single hazard*) dan gabungan dari beberapa hazard yang ada (*multi hazard*), dengan memperhatikan parameter-parameter bahaya, kerentanan, dan kapasitas sebagai penghitungan risiko bencana.

Secara nasional posisi Provinsi Jawa Tengah mendasarkan kajian rawan bencana, menempati urutan/rangking pertama dan termasuk tingkat kerawanan tinggi bersama dengan 27 provinsi yang lain. 6 provinsi lainnya termasuk kategori rawan sedang. Jika data indeks rawan tersebut dirinci menurut Kabupaten/Kota maka di Jawa Tengah terdapat 34 kabupaten/Kota termasuk rawan tinggi dan 1 (kota) rawan sedang. ingkat kerawanan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1
Indeks Rawan Bencana Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Rawan	Rangking Nasional
1	2	3	4	5
1.	Cilacap	132	Tinggi	3
2.	Banyumas	123	Tinggi	8
3.	Kebumen	113	Tinggi	12
4.	Klaten	106	Tinggi	19
5.	Wonosobo	105	Tinggi	20

No	Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Rawan	Rangking Nasional
1	2	3	4	5
6.	Jepara	105	Tinggi	21
7.	Semarang	103	Tinggi	23
8.	Karanganyar	102	Tinggi	24
9.	Brebes	101	Tinggi	25
10.	Pati	98	Tinggi	31
11.	Magelang	94	Tinggi	42
12.	Boyolali	92	Tinggi	43
13.	Purworejo	91	Tinggi	46
14.	Wonogiri	89	Tinggi	55
15.	Kota semarang	87	Tinggi	60
16.	Sukoharjo	82	Tinggi	76
17.	Pemalang	78	Tinggi	101
18.	Kudus	78	Tinggi	103
19.	Rembang	77	Tinggi	107
20.	Pekalongan	76	Tinggi	116
21.	Sragen	76	Tinggi	118
22.	Grobogan	75	Tinggi	126
23.	Banjarnegara	75	Tinggi	127
24.	Kendal	73	Tinggi	139
25.	Temanggung	70	Tinggi	149
26.	Demak	69	Tinggi	153
27.	Tegal	64	Tinggi	180
28.	Purbalingga	62	Tinggi	192
29.	Batang	62	Tinggi	193
30.	Kota Surakarta	60	Tinggi	207
31.	Blora	58	Tinggi	222
32.	Kota Pekalongan	52	Tinggi	272
33.	Kota Tegal	46	Tinggi	322
34.	Kota Magelang	44	Tinggi	343
35.	Kota Salatiga	34	Sedang	404

Sumber: BNPB, IRBI 2011

Kajian terhadap risiko bencana dilakukan BNPB pada tahun 2013. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2013, Provinsi Jawa Tengah menempati urutan/rangking 13 (tiga belas) di tingkat nasional dari 26 provinsi yang termasuk risiko tinggi (7 provinsi risiko sedang). Dengan demikian upaya-upaya penguangan risiko bencana yang dilakukan selama ini telah berdampak positif untuk mengurangi risiko ancaman bencana. Mendasarkan data indeks risiko bencana tahun 2013 tersebut, dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terdapat 22 Kabupaten/Kota termasuk risiko tinggi, dan 13

Kabupaten/Kota lainnya termasuk risiko sedang. Data selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2
Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jateng

No	Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Risiko	Rangking Nasional
1	2	3	4	
1	Cilacap	215	Tinggi	17
2	Purworejo	215	Tinggi	18
3	Tegal	213	Tinggi	26
4	Brebes	211	Tinggi	29
5	Banyumas	207	Tinggi	36
6	Pemalang	206	Tinggi	37
7	Kebumen	203	Tinggi	49
8	Demak	184	Tinggi	95
9	Kota Semarang	184	Tinggi	96
10	Pekalongan	183	Tinggi	97
11	Pati	174	Tinggi	153
12	Rembang	172	Tinggi	164
13	Batang	168	Tinggi	175
14	Kendal	167	Tinggi	190
15	Jepara	163	Tinggi	209
16	Grobogan	162	Tinggi	220
17	Purbalingga	159	Tinggi	226
18	Boyolali	159	Tinggi	227
19	Banjarnegara	150	Tinggi	289
20	Blora	150	Tinggi	290
21	Kota Pekalongan	148	Tinggi	306
22	Wonogiri	146	Tinggi	313
23	Magelang	143	Sedang	326
24	Semarang	143	Sedang	327
25	Temanggung	143	Sedang	328
26	Sragen	142	Sedang	334
27	Wonosobo	135	Sedang	358
28	Kudus	132	Sedang	378
29	Karanganyar	130	Sedang	388
30	Klaten	123	Sedang	414
31	Kota Tegal	117	Sedang	441
32	Kota Magelang	108	Sedang	459
33	Sukoharjo	93	Sedang	482
34	Kota Salatiga	91	Sedang	485
35	Kota Surakarta	80	Sedang	490

Sumber: BNPB, IRBI Tahun 2013

BPBD Jawa Tengah telah mencermati dan menindaklanjuti dengan mengumpulkan data daerah rawan bencana yang meliputi wilayah desa/kelurahan, kecamatan dan warga terdampak. Data daerah rawan bencana Jawa Tengah yang dikumpulkan oleh BPBD Prov Jawa Tengah dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3
Daerah Rawan Bencana di Jawa Tengah

No	Bencana	Kab		Kec		Desa/Kel		KK	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Banjir	32	91,42	314	54,8	1.776	20,7	772.177	8,0
2	Longsor	29	82,85	342	59,7	2.331	27,2	642.001	6,6
3	Kekeringan	27	77,14	235	41	1.443	16,8	677.952	7,0
4	Angin puting beliung	12	42,85	132	23,0	752	8,8	282.212	2,9
5	Gempabumi	14	37,14	116	20,2	1.514	17,6	1.416.145	15,1
6	Tsunami	4	11,42	20	3,5	127	1,5	128.186	1,3
7	Gunung api	11	31,42	47	8,2	276	3,2	200.634	2,1
8	Gas Beracun	3	8,57	13	2,3	44	0,5	33.744	1,3
9	Kebakaran Hutan/Lahan	22	62,85	122	21,3	749	8,7	169.498	1,7

2. Sumberdaya

Upaya-upaya pengurangan risiko bencana harus dilaksanakan secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan. Pengurangan risiko bencana merupakan tindakan untuk meminimalkan dampak bencana terhadap kehidupan manusia sehingga kerugian jiwa dan materil serta kerugian lainnya. Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Peningkatan kapasitas diprioritaskan secara kelembagaan maupun sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana.

Jumlah personel sumberdaya manusia di BPBD Prov Jawa Tengah cukup terbatas. Jumlah dan tingkat pendidikan sumberdaya manusia (SDM) di BPBD Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Jumlah Pegawai BPBD Provinsi Jawa Tengah

No	Pegawai	Jumlah		Pendidikan Terakhir						Total
		Pria	Wanita	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PNS	48	15	18	19	1	22	3		63
2	Non PNS									
	a. Harian Lepas	1	-				1			1
	b. Outsourcing	14	3		12		5			17
	Total	63	18	18	31	1	28	3		81

Data sumberdaya PNS menurut pangkat dan golongan di BPBD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Pangkat/Golongan PNS di BPBD Prov. Jawa Tengah

No	Pangkat / Gol	Jumlah
1	2	3
1	Golongan IV	: 13 orang
	a Pembina Utama Madya (IV/d)	: 1 orang
	b Pembina Utama Muda (IV/c)	: - orang
	c Pembina Tk I (IV/b)	: 4 orang
	c Pembina (IV/a)	: 8 orang
2	Golongan III	: 34 orang
	a Penata Tk I (III/d)	: 10 orang
	b Penata (III/c)	: 6 orang
	c Penata Muda Tk I (III/b)	: 18 orang
	d Penata Muda (III/a)	: 1 orang
3	Golongan II	: 12 orang
	a Pengatur Tk I (II/d)	: 1 orang
	b Pengatur (II/c)	: 4 orang
	c Pengatur Muda Tk I (II/b)	: 6 orang
	d Pengatur Muda (II/a)	: 1 orang
4	Golongan I	: 4 orang
	a Juru Tk I (I/d)	: - orang
	b Juru (I/c)	: 1 orang
	c Juru Muda Tk I (I/b)	: - orang
	d Juru Muda (I/a)	: 3 orang
	JUMLAH	: 63 orang

Secara kelembagaan, BPBD Provinsi terdiri dari unsur pelaksana dan unsur pengarah. Unsur pengarah BPBD Prov Jawa Tengah diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah. Unsur Pengarah BPBD Provinsi Jawa Tengah sejumlah 11 (sebelas) orang anggota yang terdiri dari Perwakilan SKPD dan Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional. Anggota Unsur pengarah penanggulangan bencana ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah 120/42/2010 yang berlaku sampai dengan 30 April 2015. Susunan anggota Unsur Pengarah BPBD Provinsi Jawa Tengah pada periode ini adalah sebagai berikut:

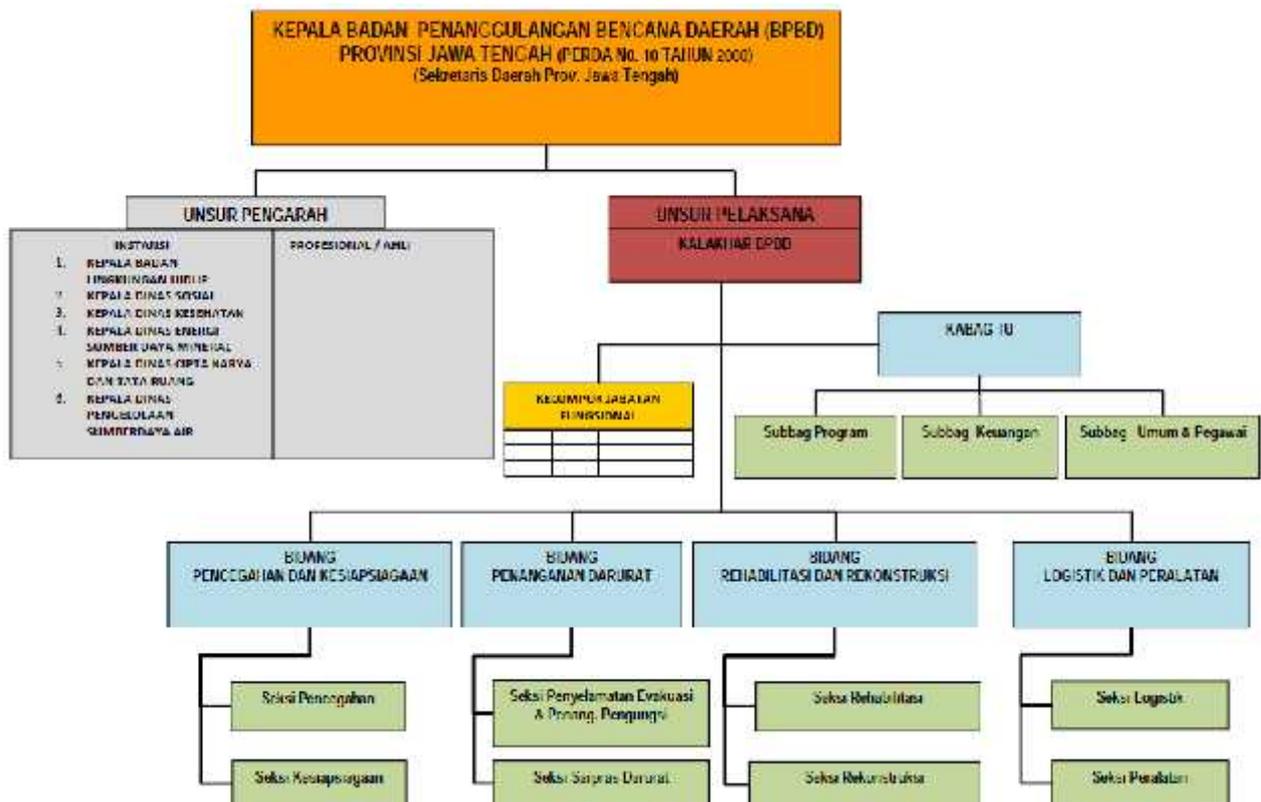
a. Unsur Pengarah dari SKPD, terdiri dari :

- 1) Kepala Badan Lingkungan Hidup;
- 2) Kepala Dinas Sosial;
- 3) Kepala Dinas Kesehatan;
- 4) Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral;
- 5) Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang;
- 6) Kepala Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air.

b. Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional terdiri dari 5 (lima) orang terpilih yang mempunyai kompetensi dan kapasitas dan mempunyai latar belakang keahlian/keilmuan dalam penanggulangan bencana. Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional periode I (2010-2014) adalah :

- 1) Drs. Sri Mulyadi, MM;
- 2) Ir. M. Edy Waluyo;
- 3) Emmy Rochayati, SH;
- 4) Herman Suryosardjono, SH;
- 5) Budiharjo SH;

Secara struktur organisasi, kelembagaan BPDB provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi BPBD Prov Jawa Tengah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana, BPBD Prov Jawa Tengah didukung dengan beberapa peralatan baik yang bersifat umum maupun khusus, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6
Sarana dan Prasarana Kedinasan Umum Tahun 2015

No	Nama Bidang	31 Des 2014 (1 Jan 2015)		31 Jan 2015	
		Jumlah	Harga (Rp)	Jumlah	Harga (Rp)
1	2	3	4		
1	TANAH	2	3,100,000,000	2	3,100,000,000
	Tanah	2	3,100,000,000	2	3,100,000,000
2	PERALATAN DAN MESIN	2,490	11,907,369,520		
	Alat-alat besar	23	1,719,692,500	27	2,843,695,000
	Alat-alat Angkutan	68	5,152,753,946	74	6,331,416,446
	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	6	309,100,000	6	309,100,000
	Alat-alat Pertanian / Peternakan	-	-		
	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1,807	4,436,668,071	1,875	4,650,888,071

No	Nama Bidang	31 Des 2014 (1 Jan 2015)		31 Jan 2015	
		Jumlah	Harga (Rp)	Jumlah	Harga (Rp)
1	2	3	4		
	Alat-alat Studio dan Komunikasi	439	1,293,564,949	546	1,444,094,949
	Alat-alat Kedokteran	-	-		
	Alat-alat Laboratorium	-	-		
	Alat-alat Keamanan	194	777,486,003	205	1,207,652,003
	Alat Metrologi dan Geofisika/Alat Ukur	-	-		
	Alat Olah Raga	-	-		
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	2	3,098,015,468	3	6,877,783,968
	Bangunan Gedung	2	3,098,015,468	3	6,877,783,968
4	JALAN, JEMBATAN, BANGUNAN	8	180,433,000	8	180,433,000
	Jalan dan Jembatan	-	-		
	Bangunan Air / Irigasi	7	89,000,000	7	89,000,000
	Instalasi	1	91,433,000	1	91,433,000
	Jaringan	-	-		
5	ASET TETAP LAINNYA	478	53,459,955	483	53,847,955.00
	Buku Perpustakaan	471	52,584,955.00	476	52,972,955.00
	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	7	875,000	7	875,000
	Hewan Ternak dan Tumbuhan	-	-		
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-		
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-		
	JUMLAH	3,027	20,121,173,892	3.229	26.998.911.392

Sumber: Data Inventaris Barang/Sensus Barang Milik Daerah BPBD Prov. Jateng Semester II Tahun 2015

Sedangkan sarana dan prasarana untuk kondisi tertentu yang dimiliki disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7
Sarana dan Prasarana Untuk Kondisi Tertentu Tahun 2015

No	Kode	Jenis Peralatan		Jumlah (unit)
1	2	3		4
I	01	Alat Transportasi		
		1	Mobil Ambulance	5
		2	Mobil Tangki BBM	-
		3	Mobil Evakuasi	1
		4	Mobil Pemadam Kebakaran	3
		5	Helikopter	-
		6	Mobil Komando	1
		7	Mobil Patroli	-
		8	Mobil Jelajah	-

No	Kode	Jenis Peralatan		Jumlah (unit)
1	2	3		4
		9	Mobil Operasional	16
		10	Mobil Komunikasi	1
		11	Mobil Rescue	16
		12	Motor Ops	28
		13	Motor Trail	15
		14	Mobil Jenazah	-
		15	Mobil Box	-
		16	Pick Up	5
		17	Mobil Logpal	1
		18	Truk Serbaguna	1
		19	Mobil Dapur Lapangan	1
		20	Truk Logistik	1
		21	Truk Tangki Air	25
		22	Truk Urinoir MCK	2
		23	Mobil Water Treatmen	2
		24	Truk bak terbuka	2
		25	Kapal Motor	-
		26	Mini Bus	3
		27	Mobil Klik	2
			Jumlah	131
II	02	Alat Komunikasi dan Informasi		
		1	Sistem Komunikasi Cepat	-
		2	Portable Communication Mobile	-
		3	HT	61
		4	RIG	39
		5	GPS	4
		6	Telepon Internet Satelit	1
		7	Alat Deteksi Dini dan Pengatan Dini	-
		8	SSB/RPP	16
		9	UHF	2
		10	Wireless	-
		11	Megaphone	5
		12	Repiter / Antena	5
		13	Video Shooting	1
		14	Camera Digital	12
		15	Handycam	3
		16	Power Supply	2
			Jumlah	151
III	03	Alat Pencarian Penyelamatan dan Evakuasi		
		1	Alat Pemotong Baja dan Beton	5

No	Kode	Jenis Peralatan	Jumlah (unit)
1	2	3	4
		2 Rompi	208
		3 Life Jacket/Rompi Pelampung	142
		4 Lifebouy	8
		5 Perahu Karet 12 org	0
		6 Perahu Karet 10 org	23
		7 Perahu Karet 8 org	20
		8 Perahu Karet 6 org	1
		9 Masker Full Face	6
		10 Perahu Lipat + Mesin 18 PK	1
		11 Trailer	3
		12 Perahu Polyethylene + Mesin 9,8 PK	2
		13 Mesin Perahu 40 PK	5
		14 Mesin Perahu 25 PK	9
		15 Mesin Perahu 18 PK	5
		16 Mesin Perahu 15 PK	5
		17 Dolphin / speed boat	4
		18 Peralatan Selam	9
		19 Vertical Rescue	3
		20 Teropong / Teleskop	5
		21 Chain Saw	24
		22 Helm SAR	4
		23 Pulay	10
		24 Breathing Appars	2
		25 Life Detector	0
		26 Alat/Paket Pemadam Kebakaran	2
		27 Pakaian Tahan Panas	2
		28 Pompa Perahu	22
		29 Rak Tempat Perahu Karet	7
		30 Selang BBM	16
		31 Sandaran Mesin Tempel	4
		32 Perahu Alumunium	14
		33 Jangkar	2
		34 Ring Buoy	10
		35 Tali PP 10 mm	2
		36 Tangki BBM	18
		37 Dayung	48
		38 Pakaian Tahan Api	7
		39 Helm Tahan Panas	4
		40 Sepatu	44
		41 Sarung Tangan	4

No	Kode	Jenis Peralatan		Jumlah (unit)
1	2	3		4
		42	Helm Biasa	9
		43	Perahu Kayu	2
		44	Bidai Spinal	2
		45	Perahu Amphibi	1
			Jumlah	724
IV	04	Alat Pemenuhan Kebutuhan Dasar		
		1	WTP 250 lt	2
		2	WTP 500 lt	0
		3	WTP mini	
		4	Dapur Lapangan/Umum	14
		5	Fleksible Tank 2000 lt	2
		6	Fleksible Tank 1000 lt	2
		7	Toilet Lapangan	0
		8	Tenda Posko	14
		9	Tenda Keluarga	329
		10	Tenda Regu	109
		11	Tenda Pleton	106
		12	Tenda Pengungsi	40
		13	Tenda Sekolah	0
		14	Tenda Lapangan	10
		15	Tenda RS Lapangan	1
		16	Tenda Individu	12
		17	Tenda Doom	100
		18	Tandu Lipat	12
		19	Echosounder	2
		20	Velbed	411
		21	Tandon Air Plastik	4
		22	Tandon Air Fiber Glas	2
		23	Tandu Spinal	6
		24	Tenda Terpal Plastik	1.118
		25	Jas Hujan	0
		26	MCK Komunal	80
			Jumlah	2.378
V	05	Alat Berat		
		1	Scope Loader	0
		2	Back Hoe	1
		3	Truck W Crane 3 Ton	8
		4	Tandem Vibration Roller 4 Ton	10
		5	Crane on Wheel 15 Ton	1
		6	Wheel Loader 1,2 - 1,5 MB	1

No	Kode	Jenis Peralatan		Jumlah (unit)
1	2	3		4
		7	Head Tractor & trailer	2
		8	Loader	0
		9	Exavator	7
		10	Dump Truck	27
		11	Grader	0
		12	Bulldoser	1
		13	Ponton	1
		14	Vibro Hammer	5
		15	Wheel Loader	0
		16	Ulhantor Roller	0
			Jumlah	64
VI	06	Alat Penerangan dan Kelistrikan		
		1	Senter	11
		2	Solar Sel Generator	0
		3	Lampu Senter HID	2
		4	Lampu Srt Halogen	3
		5	Lampu Badai	0
		6	Genset 5 KVA	14
		7	Genset 10 KVA	6
		8	Genset 1,2 KW	1
		9	Genset 1000 watt	4
		10	Solar Handle Lamp	6
		11	Lampu Penerangan (Solar Cell)	60
		12	Light Tower Port	7
		13	Lampu senter HID Seacrh Light	2
		14	Kabel	4
		15	Tiang Lampu Lapangan	5
		16	Lampu Lapangan (Sport Light)	4
		17	Senter Besar	6
		18	Lampu Rotator	30
		19	Lampu Sorot	0
		20	Emergency Lamp	6
			Jumlah	171
VII	7	Alat Pergudangan		
		1	Froklift	1
		2	Hand Froklift	1
		3	Gerobak Sorong	0
		4	Trolley	2
		5	Rak Gondola	0
		6	Palka	100
		7	Safety Equipment	0

No	Kode	Jenis Peralatan		Jumlah (unit)
1	2	3		4
		8	Tenda Gudang	0
		9	Water Closed	0
		10	Tabung Gas 12 Kg	3
		11	Tabung Gas 3 Kg	7
		12	Selang	0
		13	Helm Kerja / PMK	0
		14	Topi Proyek	0
			Jumlah	114
VIII	8	Alat Lainnya		
		1	Pompa air	53
		2	Kawat Bronjong	7.733
		3	Karung Plastik	228.000
		4	Garpu Sampah	32
		5	Dirgen 40 L	0
		6	Hand Sprayer	0
		7	Knock Down Closet	0
		8	Mesin Fogging	0
		9	Drag Bar	0
		10	Water furifier	2
		11	CCTV	8
			Jumlah	238.828
			Jumlah Total	239.561

Sumber :

Data Inventaris Peralatan Penanggulangan Bencana Jawa Tengah s.d Desember 2015 pada Bidang Logistik dan Peralatan BPBD Prov Jateng

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh BPBD sebagai *leading sector*nya sebagaimana amanat Perda 11 tahun 2009. Penyelenggaraan Penanggulangan bencana dilakukan secara teintegrasi meliputi tiga yaitu: pra, saat dan pascabencana. Oleh sebab itu, BPBD Prov Jawa Tengah bertanggungjawab dalam tiga tugas utama, yaitu pelaksana, komando dan koordinasi. Sebagai pelaksana, BPBD wajib untuk memberikan perlindungan dan penanggulangan bencana, sedangkan fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando /perintah kepada seluruh sumberdaya untuk

penanggulangan bencana, dan sedangkan fungsi koordinasi dilaksanakan untuk mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pascabencana.

Dukungan sarana dan prasarana yang dikelola BPBD Prov Jawa Tengah dioptimalkan untuk penanganan bencana terutama pada tahapan pra bencana. Pada tahapan ini, kegiatan kesiapsiagaan, pencegahan, mitigasi, perencanaan, dan peringatan dini (*early warning*) mempunyai nilai strategis yang dapat menentukan kegiatan pada saat tahap darurat. Tahap saat bencana (tanggap darurat) merupakan tahap yang sangat krusial. Pada tahap ini kegiatan penanggulangan bencana bertumpu pada penyelamatan dan evakuasi. Permasalahan pengungsian menjadi salah satu isu penting karena bencana menyebabkan kerusakan tempat tinggal sehingga masyarakat terdampak memerlukan hunian. Tindakan saat darurat akan disusul dengan fase transisi dan kemudian tahapan pasca bencana (tahap pemulihan). Tahapan ini terdiri dari dua prioritas, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Prinsip dasar dari fase pemulihan ini adalah untuk membangun kembali dengan lebih baik dan lebih aman.

Mendasarkan pada paradigma penanggulangan bencana yaitu pengurangan risiko bencana, maka upaya-upaya pada pra bencana (tidak terjadi bencana ataupun terdapat potensi terjadi bencana) menjadi lebih dominan dibandingkan dengan penanganan saat bencana. Upaya yang dilakukan pada fase pra bencana menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan dalam penanggulangan bencana. Upaya pengurangan risiko bencana tidak terlepas dari dukungan seluruh elemen pemangku kepentingan baik tingkat pemerintahan, lembaga usaha dan juga masyarakat. Komitmen yang kuat untuk mengurangi risiko bencana sangat diperlukan untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari.

B. Fungsi Strategis BPBD Prov Jawa Tengah

BPBD Prov Jawa Tengah mempunyai fungsi stretegis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah. Penyelenggaraan Penanggulangan bencana dilakukan secara teintegrasi pada tiga tahapan bencana, yaitu pra, saat, dan pascabencana. Oleh sebab itu, BPBD Prov Jawa Tengah mempunyai tiga tugas utama dalam penanggulangan bencana, yaitu pelaksana, komando dan koordinasi.

1. Visi

Mewujudkan Masyarakat Jawa Tengah yang Tangguh dalam Penanggulangan Bencana

2. Misi

- a. Mengembangkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang handal
- b. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana
- c. Memberdayakan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
- d. Membangun kerjasama antar Pemangku Kepentingan PB
- e. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana

3. Tujuan

- a. Mewujudkan regulasi penanggulangan bencana yang memadai;
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Meningkatkan sumber daya aparatur dan sarpras yang handal dalam penanggulangan bencana;
- d. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- e. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- f. Membangun jejaring dan kerjasama strategis dengan para pemangku kepentingan penanggulangan bencana;

- g. Mengembangkan dan membangun basis data dan informasi bencana kepada seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana Jawa Tengah dan nasional.

4. Sasaran

- a. Tersusunnya Peraturan /Pedoman/SOP bidang Kebencanaan
- b. Terintegrasinya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (umum dan tematik) dalam dokumen rencana pembangunan daerah
- c. Terpenuhinya sumber daya yang siap dalam penanggulangan bencana
- d. Terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana
- e. Penguatan dan Sinergi Kelembagaan PB Jawa Tengah
- f. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengenali dan mengantisipasi ancaman bahaya
- g. Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan PB
- h. Terbentuknya jejaring dan kerjasama kelompok / komunitas masyarakat, dunia usaha, dan lembaga peduli bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
- i. Tersedianya pusat data informasi bencana, basis data dan informasi bencana Jateng terkini
- j. Termanfaatkannya teknologi tepat guna untuk PB dengan memperhatikan kearifan lokal

C. Permasalahan Utama yang Dihadapi

BPBD Prov Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menemukan beberapa kendala. Kendala tersebut merupakan suatu tantangan yang perlu disikapi dengan lebih baik sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan PB secara menyeluruh. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi antara lain adalah:

1. Kelembagaan BPBD di kabupaten/kota belum terbentuk 100%. Terdapat 2 (dua) Kota yang belum membentuk BPBD berdasar Peraturan daerah, yaitu Kota Magelang, dan kota Salatiga
2. Belum seluruh BPBD Kabupaten/ Kota mempunyai dan menyusun Perda tentang Penyelenggaraan PB. Terdapat 16 kabupaten/kota yang sudah mempunyai peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana
3. Alokasi dana PB masih terbatas, sehingga rasio dana PB dengan APBD Kabupaten/Kota belum ideal
4. Belum seluruh BPBD mempunyai gedung dengan kapasitas yang ideal untuk logistik, peralatan, sarana/prasarana PB dan Pusdalops
5. Kapasitas sumberdaya manusia di BPBD sangat terbatas, baik secara kuantitas maupun kualitas
6. Penyediaan Logistik dan peralatan PB belum ideal. Masih terdapat kesenjangan antara jumlah yang harus disediakan dengan yang dimiliki
7. Kerjasama penanggulangan bencana meliputi kerjasama dengan Dunia usaha, media massa, maupun penggiat PB masih perlu terus ditingkatkan.
8. Dunia usaha di Jateng sangat besar dan sangat potensial untuk ikut serta dalam PB melalui CSR

BAB II PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam hal ini, perjanjian kinerja dilakukan antara Gubernur dengan Kepala Pelaksana BPBD Prov Jawa Tengah. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Wujud komitmen nyata antara Kalakhar BPBD Prov Jateng dengan Gubernur Jawa Tengah selaku pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

BPBD Prov Jawa Tengah telah melaksanakan perjanjian kinerja yang telah disepakati dengan Gubernur Jawa Tengah dengan melaksanakan telah melaksanakan 12 program dan 72 kegiatan yang didukung oleh APBD Prov Jawa Tengah sebesar Rp. 27.858.094.000,-. Selain dari APBD Prov Jawa Tengah, terdapat pula beberapa program/kegiatan yang dikelola melalui dana APBN melalui Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),:

1. Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Dukungan tersebut dialokasikan melalui mekanisme anggaran Dana Dekonsentrasi TA 2015 kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 641.497.000,- yang digunakan untuk penyelenggaraan 2 (dua) kegiatan, yaitu :

a. Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.

Kegiatan dilaksanakan di Kota Surakarta pada hari Rabu – Sabtu, tanggal 21 – 24 Oktober 2015, dengan peserta kegiatan berjumlah 94 (sembilan puluh empat) orang yang berasal dari BPBD dan Dinas Damkar Kabupaten/Kota

b. Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Dan Pengintegrasinya Ke Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin – Kamis, tanggal 2 - 5 November 2015 bertempat di di Kota Surakarta, dengan peserta sejumlah 90 (Sembilan puluh) orang.

Kegiatan Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Dana dekonsentrasi Kemendagri dimaksudkan untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pengurangan Risiko Bencana Dan Kebakaran sehingga pemahaman aparatur pemerintah kabupaten/kota terkait Arah kebijakan dalam Penyelenggaraan Bencana dan Penanggulangan Kebakaran sesuai UU No 23 tahun 2014 dan UU No. 24 tahun 2007 maupun keterampilan dan keahlian dalam penyusunan dokumen kedaruratan kebakaran .

Sementara kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Dan Pengintegrasinya Ke Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur BPBD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dalam rangka menyusun Rencana Penanggulangan Bencana dan integrasinya dalam rencana pembangunan daerah. Keluaran dan manfaat dari kegiatan ini adalah untuk Meningkatkan kapasitas peserta (aparatur) BPBD Kabupaten/kota dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana dan Integrasinya dalam rencana pembangunan daerah. Dengan peningkatan tersebut secara alamiah akan meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur BPBD kabupaten/kota terkait penggunaan dana bencana serta meningkatkan kapasitas aparatur BPBD Kabupaten /Kota dalam perencanaan dan penganggaran PRB. Kegiatan ini diikuti oleh 100 (seratus) orang peserta sehingga diharapkan seluruh peserta dapat menjadi fasilitator bagi instansi pengirim.

2. BNPB

BNPB memfasilitasi dan melakukan penguatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah, antara lain:

a. Dana Siap Pakai (DSP)

DSP merupakan dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana

(Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan).
Alokasi dana siap pakai BNPB yang ditransfer ke Provinsi Jawa Tengah antara lain:

1) Bencana Kekeringan 2015

Dana siap pakai bencana dikelola secara langsung oleh BNPB dan pemanfaatannya dilakukan melalui mekanisme transfer dari BNPB ke BPBD Kabupaten/Kota secara langsung. Pada tahun 2015 ini, BNPB menyetujui alokasi DSP untuk antisipasi bencana kekeringan sebesar Rp. 9.501.422.935,- dengan rincian :

(a) Alokasi DSP kekeringan untuk 18 (delapan belas) kabupaten/kota di Jawa Tengah total bantuan DSP sebesar Rp. 7.218.882.935,-.

(b) SKPD Provinsi Jawa Tengah dialokasikan dana sebesar Rp.2.282.540.000,- untuk 3 (tiga) SKPD Provinsi Jawa Tengah yaitu:

- Dinas PSDA (Rp. 1.650.000.000,-) digunakan untuk pembuatan 3 (tiga) embung yaitu

(a.) Embung Slarang Lor Desa Slarang, Kecamatan Dukuhwaru, Kab. Tegal

(b.) Embung Plumutan Desa Plumutan, Kecamatan Kemangkong Kab Purbalingga

(c.) Embung Glintang Desa Glintang, Kecamatan Sambu, Boyolali

- Dinas ESDM (Rp. 485.000.000,-) yang digunakan untuk
(a.) 1 (satu) unit sumur bor di Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong Kab Brebes

(b.) 4 (empat) sumur pasak di Kab Kendal, yaitu 2 sumur di Kec Gemuh (Desa Jenarsari dan Pucangrejo) dan 2 sumur di kecamatan Ringinganom (Desa Tejorejo dan Desa Ngerjo)

- Bakorwil I (Rp. 147.540.000,-) digunakan untuk tambahan dropping air di wilayah Bakorwil I Pati

2) Bencana Banjir dan Tanah Longsor 2015-2016

Mendasarkan pada Nota kesepahaman/MoU antara BPBD Prov Jawa Tengah dengan BNPB, Nomor 358/BNPB/12/2015 dan Nomor 362/2504/APBN/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Bantuan dana siap pakai untuk penanganan siaga darurat bencana angin, banjir dan tanah longsor di Provinsi Jawa Tengah. Dana tersebut digunakan selama masa siaga darurat bencana angin, banjir dan tanah longsor di Prov Jawa Tengah tahun 2015. BNPB mengalokasikan dana siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor tahun 2015 – 2016 kepada Pemerintah Prov Jawa Tengah sebesar Rp. 840.250.000,- yang digunakan untuk posko siaga darurat banjir dan tanah longsor. Dari alokasi dana tersebut BPBD Provinsi Jawa Tengah mengelola Rp. 429.000.000,- sedangkan Rp. 411.250.000,- dikelola oleh POLDA Jawa Tengah untuk posko siaga darurat banjir dan tanah longsor tahun 2015-2016.

b. Dana Penguatan Kelembagaan BPBD

Dukungan anggaran BNPB selain melalui dana siap pakai dilakukan pula melalui penguatan kelembagaan. Dana penguatan kelembagaan TA 2015 ini dialokasikan untuk 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- 1) Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat
Kegiatan ini dialokasikan senilai Rp. 218.104.000,- dengan tujuan untuk memantau pengembangan dan pembentukan desa tangguh bencana yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) BPBD Kabupaten/Kota yaitu Magelang, Purworejo, dan Temanggung.
- 2) Penguatan Pengurangan Risiko Bencana
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 252.000.000,-. Maksud dan tujuan alokasi anggaran kegiatan ini adalah dalam rangka pemantauan dan pengembangan pelaksanaan kegiatan

PRB di Kabupaten Cilacap yang meliputi 8 (delapan) desa dan 2 (dua) sosialisasi tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

c. Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab Rekon) Pasca Bencana

Alokasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab Rekon) Pasca Bencana dari BNPB kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk pendampingan, pengasawan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten/Kota yang memperoleh alokasi dana Rehab Rekon pasca bencana dari BNPB. Penggunaan dan mekanisme pencairan dana ini, berbeda dari tahun sebelumnya. Jika pada tahun-tahun sebelumnya, dana hibah ini ditransfer oleh BNPB kepada BPBD Prov Jawa Tengah melalui rekening BPBD provinsi Jawa Tengah yang telah diverifikasi, maka pada tahun 2015 transfer dana dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan menjadi bagian dari hibah APBN ke APBD. Dengan demikian penggunaan dana tersebut mengikuti mekanisme penganggaran APBD di Prov. Jateng.

Alokasi Dana rehab rekons pasca bencana untuk BPBD Provinsi Jawa Tengah hanya sebesar Rp. 646.414.000,-. Dana tersebut digunakan untuk monitoring dan fasilitasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh 8 (delapan) BPBD Kabupaten/kota yang memperoleh dana tersebut. Pada tahun 2015 ini, terdapat 8 (delapan) Kabupaten yang memperoleh dana rehab rekon pasca bencana yaitu:

(1.) Cilacap	:	2.344.192.000
(2.) Kebumen	:	14.417.531.000
(3.) Temanggung	:	8.737.925.000
(4.) Karanganyar	:	5.123.359.000
(5.) Jepara	:	7.557.468.000
(6.) Pati	:	14.676.737.000

- (7.) Pekalongan : 15.388.101.000
 (8.) Semarang : 920.984.000

Kendala dari penggunaan dana ini adalah terdapat keterlambatan dalam proses transfer dana dari kementerian keuangan kepada BPBD Prov Jawa Tengah melalui kas daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian pada saat mekanisme pembahasan APBD perubahan telah selesai dana belum ditransfer dan baru direalisasikan pada minggu II desember 2015. Dampak dari keterlambatan tersebut, maka dana tersebut menjadi SILPA APBD pada BPBD Prov Jawa Tengah, karena belum dapat dimanfaatkan.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kalakhar BPBD Prov Jateng dengan Gubernur Tahun 2015, adalah sebagai berikut.

Tabel 8
Penetapan Kinerja TA 2015

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
2	3	4
Tersusunnya Peraturan/Pedoman /SOP bidang PB	Peraturan/Pedoman SOP dalam penanggulangan bencana	1 pedoman
	Pembentukan BPBD Kab/Kota mll Perda	2 kab/kota
Tersusunnya dokumen Penyelenggaraan PB Jawa Tengah	Tersusunnya pedoman penanganan darurat bencana	1 unit
	Tersusunnya kesepahaman Penyelenggaraan PB lintas sektor dan lintas wilayah	2 dok
Terintegrasinya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (umum dan tematik) dalam dokumen rencana pembangunan daerah	Tersusunnya Rencana bidang PB Jawa Tengah	2 dok
	Terusunnya dokumen / peta risiko bencana Jateng	Peta bencana kekeringan di 6 kabupaten

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
2	3	4
Terpenuhinya sumber daya yang siap dalam penanggulangan bencana	Jumlah kursus dan diklat PB / pendukung PB	15 kali
	Jumlah masyarakat mengikuti kegiatan PB	2.100 orang
	Jumlah aparaturnya terlatih dalam penyelenggaraan PB	240 orang
Terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana	jumlah sarana dan prasarana PB	1 paket peralatan
		1 paket logistik
Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengenali dan mengantisipasi ancaman bahaya	Rakor Pemulihan sarana dan prasana terdampak bencana	12 kali
	Jumlah masyarakat / relawan terlatih PB	500 orang
terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan PB	Jumlah bintek/latihan Penanganan Darurat	3 keg
	Jumlah desa siaga bencana	2 desa
Terbentuknya jejaring dan kerjasama kelompok / komunitas masyarakat, dunia usaha, dan lembaga peduli bencana dalam penanggulangan bencana	Jumlah desa tangguh bencana	6 desa
	Jumlah kerjasama PB dengan lembaga penelitian/perguruan tinggi	2 dok
	Jumlah komunitas peduli bencana	1 komunitas
	Jumlah dunia usaha terlibat PB melalui alokasi dana CSR	10 dunia usaha
	Penyelenggaraan koordinasi antar instansi pemerintah	1 kali
Tersedianya pusat data informasi bencana, basis data dan informasi bencana jateng terkini	Jumlah media publikasi data dan informasi PB	3 media
	Tersedia data dan informasi kerusakan / kerugian jateng, bencana	1 unit
	<i>System early warning</i> masyarakat	2 keg
	Jumlah publikasi di media	150 publikasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tentang keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan secara transparan akuntabel. Hal ini sesuai dengan amanat PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi BPBD Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, dan hasil. Aspek penilaian tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 9
Skala Pengukuran Kinerja

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

BPBD Prov Jawa Tengah TA 2015 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana perjanjian kinerja dan rencana strategis. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dan Rencana Strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah, sasaran strategis yang diwujudkan pada tahun ini, yaitu:

1. Sasaran Strategis 1

Sasaran strategis 1 (Tersusunnya Peraturan Gubernur bidang PB), keberhasilannya diukur melalui 2 (dua) indikator, yaitu tersusunnya pedoman bidang penanggulangan bencana dan terbentuknya BPBD Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan daerah. Hasil pengukuran /perhitungan kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 10
Perhitungan Kinerja Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2013	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tersusunnya Peraturan bidang PB	Pergub dalam PB	1	1	100	300	60 %
	Pembentukan BPBD Kab/Kota ml Perda	2	0	-	117.86 %	94.28%

Pada indikator pertama, BPBD Prov Jateng telah berhasil menyusun 1 (satu) pedoman kebencanaan, yaitu dengan terbitnya

Instruksi Gubernur (Ingub), yaitu Ingub No. 360/009205 tanggal 30 Juni 2015 tentang Penanganan Darurat Bencana. Instruksi Gubernur ditujukan kepada Pangdam IV/Diponegoro, Kapolda Jateng, Bupati/Walikota se-Jateng, Ka. BMKG Jateng, Ka. BASARNAS Jateng, Ketua PMI Jateng, Ketua Kwarda XI Jateng, Para Direktur Utama Perbankan, Ka Divisi Regional PT. Telkom, Direktur PT. Pertamina, dan Ka Badan Usaha Milik Daerah Prov Jateng, serta SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Instruksi tersebut menekankan kepada upaya penanganan darurat bencana yang pada intinya:

- a. Melaksanakan penanggulangan bencana di seluruh wilayah Jawa Tengah terhadap seluruh ancaman bencana yang mengancam dan menyebabkan kehilangan jiwa dan harta benda serta kerusakan infrastruktur vital mulai dari status siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan dini.
- b. Melakukan kolaborasi, koordinasi dan kerjasama untuk melaksanakan penanganan darurat bencana;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk kegiatan penanganan darurat bencana

Sedangkan pada indikator sasaran kedua, pada tahun 2015, terbentuk 2 (dua) BPBD Kabupaten/Kota yang mendasarkan peraturan daerah, yaitu BPBD Kabupaten Sragen dan BPBD Kota Tegal. Pembentukan BPBD di Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2015 telah terbentuk 33 BPBD Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah, 1 (satu) BPBD (Kota Magelang) berdasarkan Peraturan Walikota dan 1 Kota (Kota Salatiga) belum membentuk BPBD. Pembentukan BPBD Kabupaten/Kota sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut.

Tabel 11
Pembentukan BPBD Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah

No	Kab/Kota	Tipe BPBD	Dasar Hukum	Tanggal ditetapkan		
1	2	3	4	6		
1	Cilacap	A	Perda No.22 Tahun 2008	27	September	2008
2	Banyumas	B	Perda No. 14 Tahun 2011	25	November	2011
3	Purbalingga	B	Perda No.15 Tahun 2010	13	Desember	2010
4	Banjarnegara	B	Perda No.3 Tahun 2011	10	Juni	2011
5	Kebumen	A	Perda No.8 Tahun 2010	6	Oktober	2010
6	Purworejo	A	Perda No.18 Tahun 2012	29	Desember	2012
7	Wonosobo	B	Perda No.3 Tahun 2014		Juli	2014
8	Magelang	A	Perda No.3 Tahun 2011	9	Juni	2011
9	Boyolali	A	Perda No.16 Tahun 2011	4	November	2011
10	Klaten	A	Perda No.8 Tahun 2011	25	Juli	2011
11	Sukoharjo	B	Perda No.4 Tahun 2011	24	Juni	2011
12	Wonogiri	B	Perda No.24 Tahun 2012	26	Desember	2012
13	Karanganyar	B	Perda No.8 Tahun 2011	4	April	2011
14	Sragen	B	No. 3 tahun 2015	9	Maret	2015
15	Grobogan	A	Perda No.6 Tahun 2012	27	Maret	2012
16	Blora	B	Perda No.8 Tahun 2014	28	November	2014
17	Rembang	A	Perda No.4 Tahun 2011	4	Agustus	2011
18	Pati	A	Perda No.4 Tahun 2012	4	Juni	2012
19	Kudus	B	Perda No.4 Tahun 2011	5	September	2011
20	Jepara	B	Perda No. 17 Tahun 2011	7	Desember	2011
21	Demak	A	Perda No.6 Tahun 2010	21	September	2010
22	Semarang	B	Perda No.3 Tahun 2011	19	Mei	2011
23	Temanggung	B	Perda No.24 Tahun 2011	15	Desember	2011
24	Kendal	B	Perda No.19 Tahun 2011	25	Mei	2011
25	Batang	B	Perda No. 8 tahun 2013	19	Agustus	2013
26	Pekalongan	B	Perda No. 6 Tahun 2011	12	Desember	2011
27	Pemalang	B	Perda No. 16 tahun 2012	16	Oktober	2012
28	Tegal	A	Perda No.11 Tahun 2009	22	Mei	2009
29	Brebes	A	Perda No.9 Tahun 2011	24	Maret	2011
30	Kota Magelang	-	PerWal No. 67 tahun 2013	31	Desember	2013
31	Kota Surakarta	B	Perda No.5 tahun 2013	15	Agustus	2013
32	Kota Salatiga	-	(Prolegda)	-	-	-
33	Kota Semarang	A	Perda No.12 Tahun 2010	19	Oktober	2010
34	Kota Pekalongan	B	Perda No 17 tahun 2013	31	Desember	2013
35	Kota Tegal	B	No. 1 Tahun 2014	14	Agustus	2014

Kedua indikator pada sasaran ini mengindikasikan bahwa sasaran kinerja tersebut telah tercapai dengan sangat baik, dan jika diukur dari target capaian selama 5 (lima) tahun sebagaimana renstra tahun 2014 – 2018 capaian kedua indikator tersebut melebihi dari target. Pencapaian kinerja yang melebihi target tidak dapat dipisahkan dari adanya meningkatnya kepedulian serta komitmen kuat dari para pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana. Bencana yang tiap tahun selalu terjadi di Jawa Tengah diharapkan tidak menimbulkan banyak kerusakan, kerugian, dan korban jiwa/luka-luka.

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 115.116.800,- (82,26%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 140.000.000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 24.883.200,-.

b. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran ini, tidak terlepas dari dilaksanakan program penyelenggaraan penanggulangan bencana, dengan kegiatan antara lain Kegiatan Pedoman dan Kebijakan Penyelenggaraan PB. Tantangan dalam pencapaian sasaran ini terutama pada indikator pembentukan BPBD Kabupaten/Kota adalah;

- 1) Kewenangan pembentukan organisasi/lembaga BPBD Kabupaten /kota menjadi kewenangan penuh dari pemangku kepentingan Kabupaten/Kota.
- 2) Secara kelembagaan, BPBD Kabupaten/Kota merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang relatif baru terbentuk, dengan usia pembentukan 4 bulan sampai dengan 4 tahun, sehingga kebijakannya belum secara spesifik pada tataran kebijakan dan regulasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan masih terbatas pada kebijakan-kebijakan terkait pada

pemenuhan administrasi perkantoran, seperti penataan personil, dan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran.

- 3) Masih minimnya pemahaman aparaturnya tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga masalah penanggulangan bencana belum dianggap sebagai kebijakan prioritas pembangunan di daerah dan fokus penanggulangan bencana hanya pada tanggap darurat.

Pembentukan BPBD meskipun telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 24 tahun 2007 namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala utamanya dari penafsiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja BPBD pada pasal 2 menyebutkan bahwa pembentukan BPBD ditingkat wajib di tingkat provinsi dan dapat membentuk BPBD ditingkat kabupaten/kota, dengan 2 (dua) alternative tipe BPBD, yaitu tipe A dan tipe B. Berdasarkan permendagri tersebut, di Jawa Tengah terdapat 13 (tiga belas) BPBD Kabupaten/Kota tipe A dan 20 (duapuluh) BPBD Kabupaten/Kota tipe B. Kota Magelang membentuk BPBD berdasarkan Peraturan Walikota dengan pertimbangan bahwa tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana melekat pada SKPD Kesbanglinmas, sedangkan Kota Salatiga belum membentuk BPBD dan tugas pokok fungsi penanggulangan bencana melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga. Permasalahan belum dibentuknya BPBD di 2 (dua) Kota di Jawa Tengah juga ditemukan di Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur dengan 38 Kabupaten/Kota baru terbentuk 38 BPBD Kabupaten/Kota. 3 (tiga) Kota belum membentuk BPBD, yaitu Kota Surabaya, Kota Mojokerto, dan Kota Blitar.

Upaya yang perlu terus dilakukan untuk mencapai target pada indikator tersebut adalah:

Internal :

- 1) Melakukan inisiasi dan pendampingan kelembagaan yang lebih intensif kepada para penyelenggara kebijakan strategis di Kabupaten/Kota baik eksekutif maupun legislatif sehingga dapat segera membentuk BPBD;
- 2) Melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk melakukan akselerasi pembentukan BPBD di Kabupaten/Kota;
- 3) Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk secara simultan menyusun regulasi penanggulangan bencana yang lebih spesifik seperti, regulasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, rencana penanggulangan bencana, rencana aksi daerah penanggulangan bencana, rencana kontijensi serta regulasi penanggulangan bencana lainnya.
- 4) Perlunya dukungan anggaran yang lebih memadai untuk melakukan akselerasi pembentukan BPBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, sehingga seluh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah seluruhnya akan memiliki BPBD;

Eksternal

- 1) Mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk mempertegas upaya pembentukan BPBD di tingkat kabupaten/kota
- 2) Mengoptimalkan kebijakan BNPB dalam pemberian stimulan anggaran kebencanaan hanya diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang telah membentuk BPBD dengan perda sedangkan BPBD yang dibentuk dengan perbup/wali atau bahkan belum membentuk hanya bantuan yang bersifat kedaruratan saja.

2. Sasaran strategis 2

Sasaran strategis 2 (Tersusunnya dokumen Penyelenggaraan PB Jawa Tengah) diukur melalui indicator sasaran kinerja tentang penyusunan pedoman penanganan darurat. Indicator ini tercapai melalui pelaksanaan pemantauan kejadian bencana dan penyusunan pedoman

dalam penanganan darurat dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah, yaitu:

- a. Surat Gubernur Jawa Tengah No.360/6 Tahun 2014 Perihal Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan/Kelangkaan Air Bersih di Prov Jateng)
- b. Surat Gubernur Jawa Tengah Perihal Penetapan Surat Siaga Darurat Banjir dan tanah longsor 2015 – 2016

Sedangkan pada indikator kedua yaitu diperoleh melalui kesepakatan bersama antara SKPD Provinsi Jawa Tengah yang mengampu program/kegiatan kebencanaan. Masing-masing SKPD pengampu kebencanaan saling menunjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penanggulangan bencana. Indikator sasaran ketiga diperoleh melalui sinergi dan konsolidasi antara BPBD Kabupaten/Kota dalam manajemen logistik di daerah. Selama ini, BPBD Provinsi Jawa Tengah mengambil kebijakan bahwa stok logistik bencana provinsi ditempatkan BPBD kabupaten/Kota dan jika terjadi bencana, maka stok tersebut dapat digunakan. Jika stok di kabupaten/kota terdampak habis, maka stok logistik provinsi di kabupaten/kota terdekat diharuskan untuk dimobilisasikan di daerah terdampak.

Tabel 12
Perhitungan Kinerja Sasaran 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2013	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tersusunnya dokumen Penyelenggaraan PB Jawa Tengah	Tersusunnya pedoman penanganan darurat bencana	1	2	200	400	400
	Tersusunnya kesepakatan Penyelenggaraan PB lintas sektor dan lintas wilayah	2	2	100	200	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2013	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Tersusunnya system manajemen logistic PB	2	2	100	100	100

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 549.046.000,- (83,19%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 660.000.000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 110.954.000,-.

b. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran ini, tidak terlepas dari dilaksanakan program penyelenggaraan penanggulangan bencana, dengan kegiatan antara lain adalah :

- 1) Evaluasi, Pemantauan, dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat
- 2) Sinergi Penguatan Kelembagaan Bidang Kebencanaan
- 3) Koordinasi Lintas Sektor Lintas Wilayah
- 4) Koordinasi dan Konsolidasi Logistik Bencana

3. Sasaran Strategis 3

Sasaran strategis 3, yaitu terintegrasinya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dalam dokumen rencana pembangunan daerah) diupayakan melalui penyusunan dan sosialisasi rencana penanggulangan bencana (RPB) Prov Jawa Tengah. RPB Jawa Tengah berlaku 5 (lima) tahun yaitu 2014 – 2019 dan telah ditetapkan berdasarkan Pergub No. 44 tahun 2014. Dengan demikian RPB ini menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov Jawa Tengah 2013 – 2018. RPB merupakan dokumen

utama dalam menyusun dokumen tematik bidang kebencanaan, antara lain penyusunan rencana kontinjensi. Rencana kontinjensi bencana disusun untuk tema banjir di wilayah Kabupaten Purworejo,

Sasaran strategis ini dilaksanakan pula dengan identifikasi dari daeran risiko bencana kekeringan melalui penyusunan peta risiko kekeringan di 5 (lima) Kabupaten, yaitu Temanggung, Semarang, Kota Semarang, Kendal, Demak, dan Grobogan. Dengan demikian target pada sasaran ini yang terdiri dari tersusunnya 2 (dua) dokumen penanggulangan bencana dan sosialisasinya serta dokumen peta risiko bencana kekeringan di 5(lima) Kabupaten/Kota telah terpenuhi 100%. Capaian indicator sasaran ketiga disajikan dalam table berikut.

Tabel 13
Perhitungan Kinerja Sasaran 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2013	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terintegrasinya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (umum dan tematik) dalam dokumen rencana pembangunan daerah	Tersusunnya Rencana PB Jateng	2	2	100	160	80
	Terusunnya dokumen / peta risiko bencana Jateng	1 peta (6 kab)	1 peta (6 kab)	100	440	62.85

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 476.918.650,- (81,55%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 525.000.000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 48.081.350.00,-. Efisiensi keuangan dipengaruhi oleh pemilihan lokasi kegiatan yang

menggunakan, dan pada belanja honorarium narasumber dan peserta kegiatan.

b. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan

Pencapaian sasaran kinerja ini, tidak terlepas dengan telah dilaksanakannya program penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui kegiatan:

- 1) Kegiatan Perencanaan Bidang Kebencanaan
- 2) Penyusunan Peta Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah

Pada pencapaian sasaran ini, didukung pula oleh pemangku kepentingan di daerah serta adanya kerjasama dengan penggiat PB terutama untuk kegiatan penyusunan rencana kontinjensi bencana banjir, sehingga dokumen tersebut dapat selesai sesuai target dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

4. Sasaran strategis 4

Sasaran strategis 4, yaitu terpenuhinya sumber daya yang siap dalam penanggulangan bencana. Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam rangka melaksanakan tugas dalam penanggulangan bencana kepada seluruh masyarakat. Pencapaian sasaran staretegis ini dihitung mendasarkan indicator jumlah kursus/diklat yang diikuti. Perhitungan capaian kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 14
Perhitungan Kinerja Sasaran 4**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2013	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terpenuhinya sumber daya yang siap dalam	jml kursus dan diklat teknis, PB, manajerial	13 kali	26 kali	200	118.18	40

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2013	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
penanggulangan bencana	dan pendukung PB yang dilaksanakan /diikuti	2.100 orang	2.100 orang	100	93.33	28
	Jumlah aparatur terlatih dalam penyelenggaraan PB	240 orang	950	678.57	1.030	113.85

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 1.302.816.071,- (93,63%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.391.400.000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 88.583.929,-. Efisiensi keuangan dipengaruhi oleh pemilihan lokasi kegiatan yang menggunakan asset pemerintah daerah, dan pada belanja honorarium narasumber dan peserta kegiatan.

b. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan

Pencapaian sasaran kinerja ini, tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan yaitu:

- 1) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
 - a) Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumberdaya Manusia
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - c) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - d) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 2) Program Pendidikan Non Formal dan Informal.
 - a) Pendidikan Kemasyarakatan

Pada pencapaian sasaran ini, didukung para pemangku kepentingan di daerah serta adanya kerjasama dengan penggiat PB serta penambahan anggaran yang bersumber dari APBD TA 2014.

5. Sasaran Strategis 5

Sasaran strategis 5, yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana dinilai dari 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu dari penambahan jumlah sarana/prasarana, penambahan asset dan pemulihan sarana/prasana terdampak bencana. Dibandingkan dengan penetapan kinerja di awal tahun, terdapat perbedaan /perubahan target seiring dengan berubahnya alokasi anggaran. Terutama untuk penambahan asset berupa pengadaan lift. Pengadaan lift pada capaian ini diubah dari pengadaan berupa barang modal menjadi hanya dokumen rencana pemasangan lift. Perubahan target telah diikuti dengan perubahan anggaran. Hal ini karena proses pengadaan secara lelang umum, gagal dalam proses pelelangan. Hal ini karena tidak ada pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa yang memberikan penawaran kepada panitai pengadaan (ULP Prov Jawa Tengah). Rincian sapaian sasaran strategis ini sebagai berikut.

Tabel 15
Perhitungan Kinerja Sasaran 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2013	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana	jumlah sarana dan prasarana PB	2	2	100	40	22.22
	Pemulihan sarana dan prasana terdampak bencana	12	13	108.3	30	20

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 2.551.999.018,- (94,00%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.715.000.000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 163.000.982,-. Efisiensi keuangan dipengaruhi oleh pemilihan lokasi kegiatan yang menggunakan asset pemerintah daerah, dan pada belanja honorarium narasumber.

b. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan

Pencapaian sasaran kinerja ini, tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan, yaitu:

- 1) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jateng
- 2) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana
- 3) Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana
- 4) Pemulihan dan Peningkatan Sosial dan Ekonomi PascaBencana
- 5) Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jateng
- 6) Koordinasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jateng
- 7) Sinergitas multisektor pascabencana

6. Sasaran strategis 6

Sasaran strategis 6, yaitu meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengenali dan mengantisipasi ancaman bahaya. Pada dasarnya capaian sasaran ini adalah peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana. Hal ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat dalam penanggulangan bencana, antara lain melalui dialog interaktif yang dilaksanakan melalui media televise dan radio, selain itu dilaksanakan pula kegiatan simulasi dan gladi kebencanaan dalam sebagai bentuk pendampingan kepada masyarakat. Target capaian pada sasaran ini tercapai 100 % baik dari jumlah pendampingan maupun lokasi kegiatan.

Tabel 16
Perhitungan Kinerja Sasaran 6

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2013	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengenali dan antisipasi ancaman bahaya	Jumlah masyarakat / relawan terlatih PB	6 kali , 3 kab/kota 500 org	6 kali , 3 kab/kota 665 org	100	6	12.76

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 592,397,019,- (85,23%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 695,000,000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 102,602,981,-. Efisiensi keuangan dipengaruhi oleh pemilihan lokasi kegiatan yang menggunakan asset pemerintah daerah, dan pada belanja honorarium narasumber.

b. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan

Pencapaian sasaran kinerja ini, tidak terlepas dari pelaksanaan Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan kegiatan:

- 1) Pengembangan Budaya Sadar Bencana
- 2) Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Merapi
- 3) Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana
- 4) Bimbingan Teknis SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan evakuasi

7. Sasaran strategis 7

Sasaran strategis 7 adalah terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan PB. Pada dasarnya capaian sasaran ini adalah

peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana melalui pembentukan desa siaga bencana. Pembentukan ini ditandai dengan disepakati pembentukan Tim siaga bencana tingkat desa yang bertugas sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana. Pembentukan Tim siaga bencana telah direalisasikan di 2 (dua) kabupaten, yaitu:

a) Pekalongan, yaitu desa –desa rawan bencana longsor di Kec Kandangserang

b) Purworejo, yaitu di desa-desa di Kec pituruh yang rawan longsor

Mendasarkan hal tersebut, berarti diperoleh 2 desa yang telah membentuk Tim siaga bencana tingkat desa, dengan demikian target sasaran tercapai. Pencapaian sasaran kinerja ini didukung pula melalui kegiatan Masyarakat tangguh bencana

Mendasarkan target pada RPJMD pada tahun 2015 direncanakan akan dibentuk 2 (dua) desa tangguh bencana , namun pada kenyataannya BPBD Prov Jawa Tengah dapat membentuk 8 (delapan) desa tangguh bencana. Capaian kinerja ini diperoleh karena adanya dukungan anggaran yang cukup untuk pembentukan desa tangguh bencana tersebut. Capaian kinerja pembentukan desa tangguh bencana di dukung melalui kegiatan Masyarakat Tnagguh bencana pada program penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan anggaran sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2015, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 261.695.500,- sehingga hanya digunakan sebesar Rp. 438.304.500. dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 37.39 %. Pembentukan masyarakat tangguh bencana tahun 2015 yaitu:

a. Desa Ujungbatu, Kec. Jepara, Kab.Jepara

b. Desa Sigedong, Kec. Bumijawa, Kab.Tegal

c. Desa Sijeruk Kec. Banjarmangu, Banjarnegara

d. Desa Wonosari, kec.. Temanggung, Temanggung

- e. Desa Berjo Kec Ngargoyoso, Karanganyar
- f. Desa Balong Kec Jenawi, Karanganyar
- g. Desa Kemloko Kec. Godong, Grobogan
- h. Desa Anggaswangi Kec Godong , Grobogan

Tabel 17
Perhitungan Kinerja Sasaran 7

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2013	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan PB	Jumlah desa siaga bencana	2	2	100	50	22.22
	Jumlah desa tangguh bencana	6	8	133.3		

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 563.080.500,- (66,24%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 850.000.000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 286.919.500,-.

b. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan

Pencapaian sasaran kinerja ini, tidak terlepas dari pelaksanaan Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan kegiatan:

- 1) Pengembangan masyarakat Siaga Bencana
- 2) Pengembangan masyarakat tangguh Bencana

8. Sasaran strategis 8

Sasaran strategis 8 yaitu terbentuknya jejaring dan kerjasama kelompok/komunitas masyarakat, dunia usaha, dan lembaga peduli bencana dalam penanggulangan bencana. Capaian sasaran ini diukur

pada 5 (lima) indicator sasaran yang menggambarkan kinerja sasaran. Untuk indicator kerjasama PB dilaksanakan dengan UGM, UNS, Unika Soegijapranata.

Indicator publikasi di media dilakukan melalui media Televisi (TVRI dan Kompas TV), media Cetak (Suara Merdeka, Harian Banyumas,) Radio (Sindo Trijaya FM, ElShinta, dll), leaflet berbagai jenis ancaman bencana, dan juga baliho. Selain keempat hal tersebut, publikasi melalui media website juga dilakukan sebagai sarana komunikasi kepada masyarakat secara umum. Kerjasama dengan media massa difungsikan sebagai penyebarluasan informasi kebencanaan dan himbuan kebencanaan. Perhitungan capaian kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut.

Tabel 18
Perhitungan Kinerja Sasaran 8

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2013	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terbentuknya jejaring dan kerjasama kelompok/komunitas masyarakat, dunia usaha, dan lembaga peduli bencana dalam penanggulangan bencana	1) jumlah kerjasama PB dengan lembaga penelitian/ perguruan tinggi	2	2	100	100	20
	2) Jumlah komunitas peduli bencana	1	1	100	200	16.66
	3) jumlah dunia usaha terlibat PB melalui alokasi dana CSR	10	10	100	100	13.15
	4) Penyelenggaraan koordinasi antar instansi pemerintah	2	3	150	150	30
	5) Jumlah media publikasi data dan informasi PB	3	3	100	100	20

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 1,072,491,181,- (81,87%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1,310,000,000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 237,508,819,-.

b. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan

Pencapaian sasaran kinerja ini, tidak terlepas dari pelaksanaan Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan kegiatan:

- 1) Penyusunan Studi-Studi Bidang Kebencanaan (Disaster Study)
- 2) Pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Provinsi Jawa Tengah
- 3) Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)
- 4) Koordinasi Pengembangan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk Reduksi Bencana
- 5) Pengembangan Kebijakan dan Kemitraan Penanggulangan Bencana antara Unsur Pengarah BPBD Jawa Tengah dengan Pemangku Kepentingan Penanggulangan Bencana

Sasaran kinerja ini pada prinsipnya adalah menggalang kerjasama bidang penanggulangan bencana seluas-luasnya dengan berbagai pihak baik akademisi maupun praktisi. Media Massa dipandang sebagai lembaga usaha termasuk didalamnya. Kerjasama PB juga menjadi isu bersama antar pemerintah daerah baik antar pemerintah kabupaten/kota maupun antar provinsi. Oleh sebab itu kesepakatan dan kesepakatan bersama untuk saling mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana telah ditempuh guna mewujudkan masyarakat yang tangguh dalam penanggulangan bencana.

9. Sasaran strategis 9

Sasaran strategis 9 yaitu Tersedianya pusat data informasi bencana, basis data dan informasi bencana jateng terkini. Capaian

sasaran ini diukur pada 4 (empat) indikator sasaran yang menggambarkan kinerja sasaran penyediaan data dan informasi kejadian bencana dan kerusakan / kerugian jateng terlaksana dengan pemantauan dan pelaporan secara rutin melalui posko bencana yang berlangsung setiap hari selama satu tahun.

Tabel 19
Perhitungan Kinerja Sasaran 9

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2013	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tersedianya pusat data informasi bencana, basis data dan informasi bencana jateng terkini	Tersedia data dan informasi bencana	1	1	100	100	40
	Tersedia data dan informasi kerusakan / kerugian jateng	1	1	100	100	40
	System early warning masyarakat	1	1	100	100	40
	Jumlah publikasi di media	100	160	160	160	52

Selama tahun 2015, tercatat telah terjadi 1.573 (seribu lima ratus tujuh puluh tiga) kejadian bencana di Jawa Tengah. Kejadian bencana yang paling dominan dilaporkan adalah bencana kebakaran yaitu 572 kejadian (36.35%) dengan taksiran kerugian mencapai Rp. 34.040.002.000, . Sedangkan untuk bencana hidrometeorologis yang dominan adalah bencana tanah longsor (491 / 31.21%). Rekapitulasi kejadian bencana dan taksiran kerugian di Jawa Tengah selama tahun 2015 adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 20
Kejadian dan Kerugian Bencana Jateng 2015

No	Jenis Bencana	2015*		
		Jumlah	%	Kerugian
1	2	3	4	5
1	Angin Topan	308	19.57	3.440.523
2	Banjir	176	11.17	4.363.460
3	Tanah Longsor	491	31.21	6.220.084
4	Kekeringan	23	1.45	4.116.000

No	Jenis Bencana	2015*		
		Jumlah	%	Kerugian
1	2	3	4	5
5	Kebakaran	572	36.35	34.040.002
6	Gempa Bumi	3	0.19	36.000
7	Letusan Gn. Api	-	-	
8	Gas Beracun	1	0.06	
	Tsunami	-		
Total		1.573	100	

* Laporan sampai dengan 31Desember 2015

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 1.108.632.175,- (92,39%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 19.309.450,-.

b. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan

Pencapaian sasaran kinerja ini, tidak terlepas dari pelaksanaan, 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan yaitu:

- 1) Program Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
 - a) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jateng
- 2) Program Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR
 - a) SAR Pada Event Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Sedekah laut/Sura
 - b) Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Data Kebencanaan
- 3) Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - a) Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Data dan Informasi Bencana

B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Prov Jawa Tengah TA 2015 didukung oleh dana APBD Prov Jawa Tengah dan APBN dengan nilai total keduanya sebesar Rp 39.544.568.000,- dengan rincian :

1. APBD :

a. Belanja Tidak Langsung (BTL)		Rp. 9.499.459.000,-
b. Belanja Langsung (BL)		Rp. 27.858.094.000,-
1) Belanja Pegawai	1.030.120.000,-	
2) Belanja Barang / Jasa	20.419.932.000,-	
3) Belanja Modal	6.408.042.000,-	
c. Total Belanja (BTL + BL)		Rp. 37.357.553.000,-

2. APBN :

Anggaran BNPB yang dikelola pada BPBD Prov Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

a. Kementerian Dalam Negeri		Rp. 641.497.000,-
b. BNPB		Rp. 1.545.518.000,-
1) DSP Banjir Tanah longsor	429.000.000,-	
2) Rehab Rekon	646.414.000,-	
3) Penguatan Kelembagaan		
a) Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat	218.104.000	
b) Penguatan Pengurangan Risiko Bencana	252.000.000	
c. Total APBN (a + b)		Rp. 2.187.015.000,-

Program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 pada belanja langsung APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar digunakan untuk 12 (dua belas) Program dan 72 (tujuh puluh dua)

kegiatan. Sampai dengan 31 Desember 2015, realisasi fisik belanja tidak langsung dan belanja langsung terlaksana 100% sedangkan untuk realisasi keuangan terjadi efisiensi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 21
Realisasi dan Efisiensi Anggaran

NO	SUMBER DANA	JUMLAH	REALISASI			EFISIENSI KEUANGAN	KETERANGAN
			Fisik %	KEU (Rp)	KEU (%)		
1	2	3	4	5		6	7
1	APBD	37.357.553.000	100	33.711.144.255	90.23	3.646.408.745	
a	Belanja Tidak Langsung (BTL)	9.499.459.000	100	8.597.047.444	90.50	902.411.556	Efisiensi Sesuai kebutuhan
b	Belanja Langsung	27.858.094.000	100	25.114.096.811	90.24	2.743.997.189	Efisiensi Sesuai kebutuhan
2	APBD	2.187.015.000	100				
a	Kementerian Dalam Negeri	641.497.000	100	623.801.840	97.24	17.695.160	Efisiensi sesuai kebutuhan
b	BNPB	1.545.518.000	100				
	- DSP Banjir Tanah longsor	429.000.000	100	-	-	-	Laporan pertanggungjawaban dihitung per 31 Maret 2016
	- Rehab Rekon	646.414.000					Mekanisme disesuaikan dengan APBD (belanja hibah apbn ke apbd)
	- Penguatan Kelembagaan						
	Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat	218.104.000	100	193.145.100	88.56	24.958.900	
	Penguatan Pengurangan Risiko Bencana	252.000.000	100	239.135.651	94.56	13.754.349	
3	TOTAL (1+2)	39.544.568.000					

Efisiensi dan optimalisasi anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perubahan kebijakan di tingkat Pusat dan provinsi terkait penyelenggaraan kegiatan dengan diprioritaskan di tempat-tempat instansi pemerintah

2. Adanya Surat Edaran dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk adanya efisiensi belanja honorarium narasumber dan peserta kegiatan agar hanya digunakan sebesar 75%.
3. Disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
4. Rasionalisasi/optimalisasi sumberdaya sehingga dapat mencapai target fisik dengan penghematan dukungan sumberdaya keuangan.

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Keberhasilan

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah, telah berupaya mengelola sumber daya manusia, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien untuk pelaksanaan tugas pokok dengan sebaik-baiknya. Dengan memperhatikan uraian data capaian kinerja sasaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah disimpulkan berhasil, mengingat telah tercapainya seluruh target/sasaran yang ditetapkan dengan kategori Amat Baik. Hal tersebut didukung dengan perhitungan capaian sasaran sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai 137.54%, dengan rincian pencapaian persasaran masing-masing dicapai 100%.

Tabel 22
Pengukuran Pencapaian Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian (%)	% Capaian Tahun 2013	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tersusunnya Peraturan Gubernur bidang PB	Pergub dalam PB	1	1	100	200	33,33
	Pembentukan BPBD Kab/Kota mlil Perda	2	0	-	110,7	88,57
				175		60.95
Tersusunnya dokumen Penyelenggaraan PB Jawa Tengah	Tersusunnya pedoman penanganan darurat bencana	1	4	400	400	80
	Tersusunnya kesepahaman Penyelenggaraan PB lintas sektor	2	2	100	100	20

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian (%)	% Capaian Tahun 2013	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dan lintas wilayah					
	Tersusunnya system manajemen logistic PB	2	2	100	100	12.50
				200	200	37.5
Terintegrasi ya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (umum dan tematik) dalam dokumen rencana pembangunan daerah	Tersusunnya Rencana PB Jateng	2	3	150	200	50
	Terusunnya dokumen / peta risiko bencana Jateng	1 peta (5 kab)	1	100	100	14.28
				125		32.14
Terpenuhi nya sumber daya yang siap dalam penanggulangan bencana	jml kursus dan diklat teknis, PB, manajerial dan pendukung PB yang dilaksanakan /diikuti	13 kali	26 kali	200	118.18	40
		2.100 orang	2.100 orang	100	46.66	14
		7 kali	9 kali	128.57	36	25.7
		40	40	100	20	7.54
				109.5		15.74
Terpenuhi nya sarana dan prasarana penanggulangan bencana	jumlah sarana dan prasarana PB	1	2	200	40	22.22
	Pemulihan sarana dan prasana terdampak bencana	6	6	100	30	20
				150		21.11
Meningkatny a kesadaran dan pemahaman masyarakat	Jumlah masyarakat / relawan terlatih PB	6 kali , 3 kab/kot a	6 kali , 3 kab/kota	100	6	12.76

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian (%)	% Capaian Tahun 2013	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
untuk mengenali danantisipasi ancaman bahaya						
				100		12.76
terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan PB	Jumlah desa siaga bencana	2	6	300	120	16.66
				300		16.66
Terbentuknya jejaring dan kerjasama kelompok/komunitas masyarakat, dunia usaha, dan lembaga peduli bencana dalam penanganan bencana	1) jumlah kerjasama PB dengan lembaga penelitian/ perguruan tinggi	2	2	100	100	20
	2) Jumlah komunitas peduli bencana	1	1	100	200	16.66
	3) jumlah dunia usaha terlibat PB melalui alokasi dana CSR	10	10	100	100	13.15
	4) Penyelenggaraan koordinasi antar instansi pemerintah	2	3	150	150	30
	5) Jumlah media publikasi data dan informasi PB	3	3	100	100	20
				110		
Tersedianya pusat data informasi bencana, basis data dan informasi	1) Tersedia data dan informasi bencana	1	1	100	100	20
	2) Tersedia data dan informasi kerusakan / kerugian jateng	1	1	100	100	20

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian (%)	% Capaian Tahun 2013	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
bencana jateng terkini	3) System early warning masyarakat	1	1	100	100	20
	4) Jumlah publikasi di media	100	160	160	160	32
				115		23

2. BPBD Prov Jawa Tengah melakukan efisiensi belanja kegiatan sebesar $\pm 11,79\%$ (\pm Rp. 3.775.401.064,-). Efisiensi tersebut dapat berubah mengingat satu kegiatan yang bersumber dari BNPB yaitu Dana Siap Pakai (DSP) untuk antisipasi bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung, kegiatannya masih berlangsung sampai dengan 31 Maret 2015. Efisiensi dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pengelola keuangan dan juga penyesuaian anggaran sehingga diperoleh optimalisasi sumberdaya dengan tidak mengurangi target namun hemat dalam penggunaan sumberdaya keuangan. Rincian efisiensi anggaran tersebut adalah sbb:

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Mensikapi tantangan yang dihadapi selama ini, maka beberapa strategi perlu dirumuskan kembali untuk pencapaian dan peningkatan kualitas manfaat kegiatan PB, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi pengurangan risiko bencana lebih difokuskan pada masyarakat yang menempati daerah rawan bencana dengan potensi/risiko tinggi.
2. Peningkatan pemahaman terhadap peraturan bidang kebencanaan beserta baik yang bersifat operasional dilapangan maupun teknis administratif kepada aparatur pemerintah, sehingga kegiatan menjadi lebih akuntabel dan transparan.

3. Memberikan pelatihan secara tepat kepada aparatur, masyarakat dan dunia usaha terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, pada tahap sebelum, pada saat dan setelah terjadi bencana.
4. Mendorong Pemerintah Kabupaten/kota yang belum membentuk BPBD dengan peraturan daerah, untuk segera membentuk BPBD dengan peraturan daerah serta mengisi struktur dan lembaganya dengan personil yang berkompeten.
5. Mendorong BPBD Kabupaten/Kota untuk penyusunan dokumen perencanaan, seperti rencana penyelenggaraan bencana, rencana kontijensi dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi
6. Pendokumentasian kegiatan PB sejak dini, termasuk upaya antisipasi dan dijadikan sebagai model sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran bersama dan bahkan dapat menjadi pedoman atau *Standard Operational Procedure (SOP)* bagi aparatur penyelenggaraan penanggulangan bencana
7. Meningkatkan kerjasama antara pemangku kepentingan PB terutama pada peran masyarakat dan dunia usaha. Dunia usaha perlu didorong untuk meningkatkan peran dalam PB sejak pra bencana.
8. Peningkatan kapasitas aparatur PB di seluruh tingkatan melalui Diklat teknis dan formal, sebagai upaya menyikapi terjadinya rotasi /mutasi aparatur sumberdaya PB yang telah terlatih sehingga mempunyai kompetensi yang sama.
9. Mendorong BNPB untuk melakukan sertifikasi bagi aparatur PB di daerah sehingga dapat dimonitoring kompetensi dan kapasitas masing-masing aparatur PB melalui Pendidikan dan pelatihan sumberdaya kebencanaan wajib dilakukan setiap periode
10. Pemutakhiran data sumberdaya sarana dan prasarana yang ada dilingkungan pemerintah daerah yang dapat dimobilisasi saat terjadi bencana.

11. Memberikan masukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar dapat memberikan alokasi dana untuk pengurangan risiko bencana lebih besar dibandingkan operasional kegiatan penanggulangan yang lain.
12. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara efektif kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk mengalokasikan anggaran yang tepat pada upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah.
13. Melakukan kerjasama dengan lembaga donor nasional maupun internasional perlu dibina dan digalakkan terutama untuk mendukung penguatan kapasitas masyarakat, Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di berbagai lembaga usaha juga dapat dikelola sebagai bagian dukungan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Salam tangguh dan salam kemanusiaan....!